

RESPON SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TERHADAP KEBIJAKAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI): SUATU KAJIAN KEPUSTAKAAN

Sipikir Hondro¹, Stefanus Dully²

Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia (STTAI) Surabaya
e-mail: [*sipikirhondro@gmail.com*](mailto:sipikirhondro@gmail.com)¹, [*stefanusdully19@gmail.com*](mailto:stefanusdully19@gmail.com)²

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2026-9-30
Review : 2026-9-30
Accepted : 2026-9-30
Published : 2026-9-30

KATA KUNCI

KKNI, Sekolah Tinggi Teologi, Kompetensi Lulusan, Capaian Pembelajaran, RPL, Mutu Pendidikan.

A B S T R A K

Dalam Penelitian ini mengkaji secara konseptual respons Sekolah Tinggi Teologi (STT) terhadap penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui kajian terhadap literatur, regulasi, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa KKNI perlu diterapkan secara substantif dengan mengarahkan pendidikan teologi dari orientasi ijazah menuju pencapaian kompetensi yang terukur. Implementasinya mencakup penyelarasan profil lulusan, capaian pembelajaran, kurikulum, pembelajaran, asesmen, pengalaman praktik pelayanan, dan penjaminan mutu. Kajian juga menemukan bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memiliki peluang strategis bagi STT untuk mengakui pengalaman belajar, pelayanan, pelatihan, dan kompetensi yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan demikian, KKNI dan RPL dapat dikembangkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat mutu pendidikan serta menghasilkan lulusan teologi yang kompeten dan relevan bagi gereja dan masyarakat. Dalam Penelitian ini mengkaji secara konseptual respons Sekolah Tinggi Teologi (STT) terhadap penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui kajian terhadap literatur, regulasi, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa KKNI perlu diterapkan secara substantif dengan mengarahkan pendidikan teologi dari orientasi ijazah menuju pencapaian kompetensi yang terukur. Implementasinya mencakup penyelarasan profil lulusan, capaian pembelajaran, kurikulum, pembelajaran, asesmen, pengalaman praktik pelayanan, dan penjaminan mutu. Kajian juga menemukan bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memiliki peluang strategis bagi STT untuk mengakui pengalaman belajar, pelayanan, pelatihan, dan kompetensi yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan demikian, KKNI dan

RPL dapat dikembangkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat mutu pendidikan serta menghasilkan lulusan teologi yang kompeten dan relevan bagi gereja dan masyarakat.

Keywords:

KKNI, Theological School, Graduate Competencies, Learning Outcomes, Recognition Of Prior Learning (RPL), Educational Quality.

A B S T R A C T

This study conceptually examines the response of Theological Schools (Sekolah Tinggi Teologi or STT) to the implementation of the Indonesian National Qualifications Framework (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia or KKNI). The research employs a qualitative approach with a library research method by analyzing literature, regulations, policy documents, and previous studies. The findings indicate that the KKNI needs to be implemented substantively by shifting the orientation of theological education from a degree-oriented approach toward the achievement of measurable competencies. Its implementation encompasses aligning graduate profiles, learning outcomes, curriculum, instruction, assessment, practical ministry experience, and quality assurance. Furthermore, the study reveals that Recognition of Prior Learning (Rekognisi Pembelajaran Lampau or RPL) offers a strategic opportunity for STT to acknowledge prior learning experiences, ministry, training, and competencies previously acquired. Thus, KKNI and RPL can be developed as strategic instruments to enhance educational quality and produce competent theological graduates who are relevant to both the church and society.

PENDAHULUAN

Fenomena pendidikan di Indonesia masih menghadapi kuatnya paradigma pragmatis yang menempatkan ijazah sebagai tujuan utama pendidikan. Orientasi tersebut berpotensi menggeser hakikat pendidikan yang seharusnya menekankan pembentukan kompetensi, karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan memperoleh kelulusan secara cepat dan kebutuhan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi serta kompetensi yang dapat dibuktikan.

Sebagai upaya memperkuat mutu dan keterukuran kualifikasi lulusan, pemerintah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. KKNI memberikan kerangka untuk menghubungkan jenjang pendidikan dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang terbentuk melalui proses internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, serta pengalaman yang diperoleh selama proses pembelajaran dan pekerjaan (Indonesia, 2012). Dengan demikian, keberhasilan

pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan kepemilikan ijazah, tetapi juga berdasarkan kemampuan nyata yang dimiliki lulusan.

Kerangka ini juga membuka ruang bagi pengakuan pengalaman belajar melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), meskipun pemanfaatannya masih menghadapi keterbatasan pemahaman dan sosialisasi di masyarakat. Tetapi belajar dari PT di lingkungan keagamaan Islam, sudah segera diimplementasikan RPL bagi masyarakat pada tahun 2024 (Koeron, 2024), sebagai implementasi yang tidak menunggu lama dari KKNi oleh pemerintah.

Implementasi KKNi pada lembaga pendidikan pada kenyataannya tidak cukup berhenti pada pemenuhan dokumen akademik dan akreditasi. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana institusi menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, pengembangan sumber daya manusia, dan sistem penjaminan mutu. Karena itu, keberhasilan kebijakan KKNi sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen lembaga pendidikan dalam menginternalisasikannya secara substantif.

Persoalan tersebut memiliki relevansi khusus bagi Sekolah Tinggi Teologi (STT). Pendidikan teologi tidak hanya bertujuan membangun penguasaan akademik, tetapi juga membentuk karakter, spiritualitas, integritas, kompetensi profesional, dan keterampilan pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan KKNi di STT menuntut penyesuaian menyeluruh, mulai dari profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, kurikulum, pembelajaran, sistem evaluasi, kompetensi dosen, hingga penjaminan mutu internal.

Dalam konteks tersebut, respon STT terhadap KKNi menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah dipahami dan diterapkan secara nyata. Implementasi yang hanya berorientasi pada kelengkapan administratif berisiko tidak menghasilkan perubahan berarti terhadap mutu pendidikan dan kompetensi lulusan. Sebaliknya, internalisasi KKNi secara konsisten dapat menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan pendidikan teologi dari orientasi memperoleh ijazah menuju pencapaian kompetensi yang relevan dan terukur.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada respon Sekolah Tinggi Teologi dalam melaksanakan kebijakan KKNi, khususnya berkaitan dengan kesiapan institusi, penerapan kebijakan, dan upaya memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pendidikan tinggi, gereja, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dengan corak analitis. Metode tersebut digunakan karena fokus penelitian terletak pada penelaahan, interpretasi, dan analisis kritis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan KKKNI dan penerapannya dalam pendidikan tinggi teologi. Bahan kajian mencakup buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Analisis literatur difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu konsep dan orientasi KKKNI, penerapannya dalam pendidikan tinggi, karakteristik pendidikan teologi, serta kesiapan dan respons lembaga pendidikan teologi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kajian juga mempertimbangkan persoalan pragmatisme pendidikan yang menempatkan ijazah sebagai tujuan utama, sementara pembentukan kompetensi dan capaian pembelajaran sering kali kurang mendapat perhatian.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses seleksi sumber, pembacaan kritis, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi berbagai perspektif, dan penyusunan sintesis. Proses tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi dan implementasi KKKNI dalam pendidikan tinggi teologi. Penelitian ini tidak bertujuan menggambarkan kondisi empiris suatu STT tertentu melalui penelitian lapangan, melainkan membangun argumentasi konseptual berdasarkan literatur, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Orientasi Kompetensi sebagai Tuntutan Pendidikan Tinggi

Hasil penelusuran terhadap berbagai literatur memperlihatkan bahwa mutu seorang lulusan perguruan tinggi tidak tepat apabila dinilai semata-mata dari keberhasilannya menyelesaikan studi dan memperoleh ijazah. Kualitas lulusan perlu dipahami secara lebih komprehensif, terutama melalui penguasaan pengetahuan, kecakapan praktis, dan sikap yang memungkinkan seseorang melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam kehidupan nyata. Berbagai sumber yang dianalisis menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan kapasitas intelektual, penguasaan teknologi, dan keterampilan profesional, melainkan juga mencakup integritas moral, etika, serta karakter yang mencerminkan kualitas pribadi (Sari, n.d.) Dengan demikian, menjadikan ijazah sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan belum dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai mutu dan kesiapan seorang lulusan.

Pemahaman mengenai kualitas lulusan tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep kesiapan memasuki dunia kerja. Sejumlah penelitian tentang kesiapan kerja lulusan baru menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam menemukan peluang pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, serta melakukan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan kerja merupakan unsur yang penting dalam kesiapan profesional. Untuk mencapai kondisi tersebut, mahasiswa perlu memperoleh kesempatan yang memadai untuk memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan, mengikuti pelatihan, dan memperoleh pengalaman selama masa pendidikan. Berbagai bentuk pengembangan tersebut akan membantu lulusan menghadapi tuntutan dan kompetisi dalam lingkungan kerja yang terus berubah, bahkan, peningkatan keterampilan yang disertai pengalaman

praktis merupakan salah satu unsur yang berkontribusi terhadap penguatan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia profesional (Munawaroh et al., n.d.)

Landasan mengenai pentingnya kompetensi juga semakin jelas apabila ditempatkan dalam kerangka Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menempatkan KKNI sebagai suatu sistem yang mengatur jenjang kualifikasi kompetensi dan memungkinkan kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, maupun pengalaman kerja untuk disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan. Kerangka tersebut digunakan sebagai dasar dalam memberikan pengakuan terhadap kompetensi kerja berdasarkan kebutuhan serta struktur pekerjaan pada berbagai bidang. KKNI mencakup sembilan tingkat kualifikasi, sementara hasil pembelajaran yang dicapai melalui jalur pendidikan ditempatkan dan disetarakan berdasarkan jenjang kualifikasi yang relevan (Indonesia, 2012).

Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada pencapaian administratif berupa kelulusan dan penerbitan ijazah. Proses pendidikan perlu menghasilkan kemampuan yang dapat dirumuskan sebagai capaian pembelajaran dan ditempatkan pada tingkat kualifikasi tertentu. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, prinsip ini menuntut agar keseluruhan proses pembelajaran dirancang untuk membentuk kompetensi yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh mahasiswa. Oleh sebab itu, KKNI dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mengarahkan perubahan paradigma pendidikan, yaitu dari pola yang berfokus pada penguasaan isi pembelajaran (contents oriented) menuju pendekatan yang menekankan kompetensi serta ketercapaian hasil belajar.

Perubahan orientasi tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya paradigma pembelajaran yang memberikan posisi lebih aktif kepada mahasiswa. Literatur tentang strategi pembelajaran memperlihatkan bahwa pola teacher centered learning yang menempatkan dosen sebagai pusat kegiatan pembelajaran memiliki keterbatasan apabila digunakan sebagai satu-satunya pendekatan untuk membangun kompetensi mahasiswa secara optimal. Karena itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang lebih partisipatif, inovatif, dan kreatif, termasuk pendekatan Student Centered Learning (SCL) yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar serta menekankan pencapaian kompetensi. Salah satu model yang dapat diterapkan dalam pendekatan tersebut adalah Problem Based Learning (PBL), yaitu pembelajaran yang menjadikan persoalan tertentu sebagai stimulus bagi mahasiswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilannya (Parerungan, 2018)

Dari keseluruhan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan KKNI sesungguhnya tidak sebatas persoalan administratif dalam penyusunan kurikulum atau dokumen akademik. Penerapannya menuntut adanya perubahan cara pandang dalam mengelola seluruh proses pendidikan. Ketika capaian pembelajaran ditempatkan sebagai tujuan utama, maka rumusan kurikulum, strategi pembelajaran, aktivitas dan pengalaman belajar, serta sistem penilaian harus dirancang secara terpadu untuk mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan institusi pendidikan tidak hanya terletak pada banyaknya mahasiswa yang berhasil diluluskan, tetapi juga pada sejauh mana institusi tersebut mampu memastikan bahwa setiap lulusan benar-benar mencapai kompetensi yang sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

Penerapan orientasi kompetensi dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teologi (STT) memiliki dimensi yang lebih khusus dibandingkan dengan pendidikan tinggi pada umumnya. Pendidikan teologi tidak semata-mata bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai doktrin dan kajian teologis, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kepribadian, kedewasaan sikap, kecakapan pelayanan, kemampuan menyampaikan gagasan, keterampilan membangun relasi dan bekerja dalam komunitas, serta kesiapan melaksanakan tanggung jawab pelayanan di tengah gereja dan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, KKNI dapat dimanfaatkan sebagai kerangka untuk memperjelas keterkaitan antara profil lulusan, capaian pembelajaran, rancangan pembelajaran, pengalaman pelayanan, dan kompetensi yang harus dimiliki setelah menyelesaikan pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, terdapat kebutuhan yang jelas untuk melakukan perubahan orientasi dalam pendidikan tinggi, yaitu dari pola yang terutama mengejar penyelesaian studi secara administratif menuju proses pendidikan yang menghasilkan kompetensi nyata dan dapat diverifikasi melalui capaian pembelajaran. Arah perubahan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip KKNI, sebab kerangka kualifikasi tersebut menempatkan kemampuan dan kompetensi sebagai unsur yang menentukan kualitas lulusan. Oleh karena itu, keberhasilan perguruan tinggi tidak seharusnya hanya diukur melalui jumlah lulusan yang memperoleh ijazah, melainkan juga melalui kemampuan institusi dalam menjamin bahwa lulusan yang dihasilkannya mempunyai kompetensi yang selaras dengan jenjang pendidikan dan kualifikasi yang telah ditetapkan.

2. Kesenjangan Kompetensi Lulusan dan Kebutuhan Dunia Kerja

Hasil penelusuran terhadap sejumlah literatur memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan yang berkembang dalam lingkungan profesional. Kesenjangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kurikulum yang belum selalu mengikuti perubahan kebutuhan pekerjaan, minimnya ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis, lemahnya pengembangan kecakapan nonteknis (soft skills), serta dinamika dunia kerja yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan institusi pendidikan dalam melakukan penyesuaian kurikulum (Pramesti et al., 2024)

Temuan tersebut menegaskan bahwa tersedianya kurikulum dalam bentuk dokumen formal belum dapat dijadikan jaminan bahwa lulusan telah siap memasuki kehidupan profesional. Kesiapan tersebut terbentuk melalui perpaduan berbagai unsur, mulai dari landasan pengetahuan akademik dan keterampilan teknis hingga kemampuan berkomunikasi, membangun kerja sama, mengelola waktu, menghasilkan gagasan kreatif, memimpin, dan merespons perubahan lingkungan. Literatur yang dianalisis juga memperlihatkan bahwa pertimbangan dunia kerja terhadap calon tenaga profesional tidak hanya didasarkan pada kemampuan akademik (hard skills). Aspek kepribadian dan relasi sosial (soft skills) seperti integritas, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, komitmen, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta kepemimpinan turut menjadi unsur yang diperhitungkan (Cici Nur Indah Sari, n.d.)

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keselarasan antara kurikulum dan kompetensi lulusan merupakan hal yang sangat penting. Kurikulum yang disusun hanya untuk memenuhi tuntutan administratif, tanpa diwujudkan dalam aktivitas belajar yang relevan, berpotensi menghasilkan perbedaan antara kompetensi yang dirancang oleh institusi dan kemampuan aktual yang dibawa oleh lulusan. Atas dasar itu, KKNI perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai kerangka dalam penyusunan dokumen akademik,

melainkan sebagai mekanisme yang mengintegrasikan profil lulusan, capaian pembelajaran, substansi kajian, aktivitas belajar, strategi pembelajaran, sistem asesmen, dan kebutuhan profesi.

Dalam situasi demikian, model pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi menjadi semakin relevan. Ketika mahasiswa memperoleh posisi sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran, tersedia kesempatan yang lebih luas untuk melatih penalaran, menghadapi dan menyelesaikan persoalan, berkolaborasi, menyampaikan gagasan, serta menghubungkan pengetahuan dengan situasi nyata. Berbagai kajian mengenai pergeseran paradigma dari teacher centered learning ke Student Centered Learning memperlihatkan bahwa transformasi strategi pembelajaran diperlukan agar proses pendidikan mampu menghasilkan lulusan dengan tingkat kompetensi yang lebih optimal (Carey et al., 2024)

Pada pendidikan tinggi teologi, persoalan kesenjangan kompetensi tidak dapat dibatasi pada ukuran kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Lulusan Sekolah Tinggi Teologi (STT) memiliki ruang pengabdian yang lebih luas, termasuk dalam pelayanan gerejawi, kepemimpinan, pendidikan, pendampingan pastoral, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kompetensi lulusan tidak cukup dibangun melalui penguasaan konsep dan teori teologi. Pengetahuan tersebut harus mampu diwujudkan dalam tindakan, keputusan, dan praktik pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan konkret di lapangan.

Dalam bidang Pendidikan Agama Kristen, pendidikan keagamaan juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan agama mempunyai tanggung jawab yang melampaui penyampaian pengetahuan keagamaan, yakni turut membentuk pribadi yang memiliki kualitas, kecakapan, dan kemampuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial.⁷ Atas dasar pemahaman tersebut, pendidikan teologi perlu memberikan perhatian terhadap keterhubungan antara materi yang dipelajari mahasiswa dan kapasitas mereka dalam menghadirkan kontribusi yang nyata bagi gereja maupun masyarakat.

Hasil sintesis dari berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa respons STT terhadap penerapan KKNi perlu diarahkan pada upaya memastikan adanya kesinambungan antara kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dan kemampuan yang benar-benar diperlihatkan oleh lulusan. Penerapan KKNi tidak dapat dianggap selesai hanya karena istilah atau konsep KKNi telah dicantumkan dalam dokumen kurikulum. Prinsip tersebut harus tercermin dalam keseluruhan pengalaman pendidikan mahasiswa, mulai dari pelaksanaan pembelajaran, kegiatan praktis, asesmen, hingga evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi.

Atas dasar itu, relevansi kurikulum dan penguatan kompetensi perlu ditempatkan sebagai unsur strategis dalam penerapan KKNi di pendidikan tinggi. Kurikulum yang hanya berorientasi pada kelengkapan struktur dan pemenuhan dokumen akademik berisiko menciptakan jarak antara kemampuan yang diharapkan dengan kompetensi aktual lulusan. Karena itu, KKNi perlu diimplementasikan sebagai suatu sistem yang membangun keterhubungan antara profil lulusan, capaian pembelajaran, pengalaman mahasiswa selama proses pendidikan, asesmen, dan tuntutan kehidupan profesional.

Bagi Sekolah Tinggi Teologi, kebutuhan tersebut memiliki arti yang semakin penting. Lulusan STT tidak hanya diharapkan memiliki fondasi pengetahuan teologis yang memadai, tetapi juga harus mampu mengaktualisasikan pengetahuan tersebut dalam berbagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab di tengah kehidupan gereja serta

masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi lulusan STT perlu dirancang secara menyeluruh dengan mempertemukan penguasaan teologi, kecakapan pelayanan, kemampuan membangun relasi, pembentukan karakter dan etika, serta kapasitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan keragaman konteks pelayanan.

3. Pengalaman Praktis sebagai Bagian dari Pembentukan Kompetensi Lulusan

Hasil penelusuran literatur memperlihatkan bahwa masih terdapat jarak antara kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi dengan tuntutan yang mereka hadapi ketika memasuki dunia profesional. Salah satu aspek yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut adalah pengalaman belajar yang bersifat praktis. Sejumlah penelitian yang mengkaji keterkaitan antara pengalaman magang, soft skills, dan motivasi kerja dengan kesiapan kerja menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh mahasiswa sebelum lulus dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung kemampuan mereka menghadapi lingkungan profesional.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pengalaman magang, soft skills, serta motivasi kerja terhadap tingkat kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja (Azhar et al., 2025)

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pengalaman yang bersentuhan langsung dengan dunia profesional dapat memperkaya proses pembelajaran. Melalui pengalaman semacam itu, mahasiswa berhadapan dengan kondisi yang tidak selalu ditemukan dalam pembelajaran teoritis di ruang kelas.

Dalam proses tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menguji penerapan pengetahuan yang telah dipelajari, melaksanakan tanggung jawab tertentu, menyesuaikan diri dengan pola kerja organisasi, sekaligus mengenali standar dan tuntutan yang berlaku dalam lingkungan profesional (Azhar et al., 2025)

Literatur lainnya semakin menegaskan bahwa pembelajaran yang memberikan ruang bagi pelatihan praktis, kegiatan magang, maupun praktik kerja memiliki peran dalam mempersiapkan lulusan menghadapi kompetisi profesional. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pengalaman tambahan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kemampuan yang diperlukan ketika seseorang mulai menjalankan peran profesional.

Dengan demikian, pengalaman yang diperoleh melalui keterlibatan dalam pekerjaan atau aktivitas profesional mempunyai kontribusi dalam membentuk kesiapan individu untuk memasuki dan menjalani kehidupan kerja secara lebih efektif (Oscar et al., 2026)

Temuan mengenai pentingnya pengalaman praktis tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka implementasi KKNI. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 membuka kemungkinan bahwa kompetensi yang terbentuk melalui pengalaman kerja dapat dipertimbangkan dalam proses penyetaraan dengan jenjang kualifikasi yang terdapat dalam KKNI. Proses penyetaraan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi memperhatikan sejumlah aspek, termasuk relevansi bidang pekerjaan, durasi pengalaman kerja, tingkat pendidikan yang telah ditempuh, serta pelatihan kerja yang pernah diikuti (Indonesia, 2012). Dengan demikian, pengalaman yang diperoleh melalui praktik memiliki kedudukan yang relevan dalam sistem pengakuan dan pengembangan kompetensi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi, gagasan tersebut dapat dijadikan landasan untuk memberikan tempat yang lebih kuat bagi pengalaman praktik pelayanan dalam proses pendidikan. Kegiatan pelayanan, praktik lapangan, pengembangan kecakapan interpersonal, serta keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan

gerejawi dan sosial dapat dirancang sebagai bagian dari pengalaman belajar. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk membawa pengetahuan teologis keluar dari ruang akademik dan menggunakannya dalam menghadapi persoalan serta kebutuhan konkret.

Meskipun demikian, kegiatan praktik pelayanan tidak seharusnya ditempatkan sekadar sebagai kegiatan pelengkap yang berdiri di luar sistem akademik. Agar memiliki nilai pendidikan yang jelas, pengalaman tersebut perlu dirancang berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Mahasiswa juga membutuhkan arahan, pendampingan, dan supervisi yang memadai selama menjalankan praktik. Selain itu, proses tersebut perlu disertai mekanisme evaluasi dengan instrumen yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa. Dengan pola demikian, praktik pelayanan dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari pengalaman belajar dan bukan hanya sebagai aktivitas tambahan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penerapan KKNi di lingkungan STT menuntut perhatian bukan hanya pada kelengkapan dokumen kurikulum, tetapi juga pada bagaimana mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang memungkinkan kompetensi tersebut berkembang dan dapat dibuktikan. Karena itu, keterkaitan antara kurikulum, RPS, strategi pembelajaran, kegiatan praktik pelayanan, dan asesmen perlu dibangun secara sistematis. Kesatuan tersebut memungkinkan proses pendidikan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menunjukkan pencapaian kompetensi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam capaian pembelajaran.

Temuan-temuan tersebut sekaligus memperkuat argumentasi bahwa pengalaman praktik pelayanan perlu dipertimbangkan sebagai komponen penting dalam pembentukan kompetensi mahasiswa teologi. Aktivitas pelayanan dan pengalaman lapangan dapat memberikan konteks konkret bagi mahasiswa untuk menguji pemahaman teologis yang diperolehnya. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kecakapan interpersonal serta kemampuan berinteraksi dengan berbagai kelompok dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Dengan demikian, pengalaman praktik dapat berfungsi sebagai jembatan antara pembelajaran akademik dan tuntutan pelayanan yang akan dihadapi lulusan.

Oleh sebab itu, implementasi KKNi di STT perlu bergerak dari pendekatan yang hanya menekankan penyusunan dan kelengkapan dokumen menuju pengelolaan pengalaman belajar yang benar-benar mendukung pencapaian kompetensi. Kurikulum dan RPS perlu diterjemahkan ke dalam metode pembelajaran serta kegiatan praktik yang relevan, sementara sistem asesmen harus mampu menilai kompetensi mahasiswa berdasarkan pengalaman belajar yang telah dijalani. Integrasi antara unsur-unsur tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih nyata bagi mahasiswa untuk memperlihatkan bahwa capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum benar-benar telah diwujudkan dalam kemampuan praktis.

4. Strategi Peningkatan Mutu Lulusan

Hasil penelusuran berbagai sumber pustaka memperlihatkan bahwa upaya meningkatkan kualitas lulusan tidak dapat dilakukan melalui satu aspek saja, melainkan memerlukan pendekatan yang menyatukan berbagai komponen pendidikan. Salah satu penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penilaian dan penyempurnaan kurikulum. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui instrumen survei, forum diskusi, maupun bentuk partisipasi lainnya sehingga institusi memperoleh gambaran mengenai pengalaman belajar mahasiswa (Aziz et al., 2024). Pendekatan demikian dapat menjadi salah satu strategi untuk

membentuk lulusan yang memiliki kualitas, kemampuan beradaptasi, dan daya saing yang lebih baik (Mardiharto, 2019)

Apabila dikaitkan dengan penerapan KKNi, proses evaluasi kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting. Rumusan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen akademik, tetapi perlu diuji melalui proses evaluasi secara periodik untuk memastikan bahwa capaian tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam pengalaman belajar mahasiswa. Evaluasi dapat diarahkan pada keterkaitan antara profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, RPS, strategi pembelajaran, perangkat asesmen, dan berbagai bentuk pengalaman belajar yang diberikan kepada mahasiswa.

Kebutuhan untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam dokumen Unit Penjaminan Mutu Internal STT Ekumene, mutu pendidikan tinggi dipahami berdasarkan tingkat keselarasan antara pelaksanaan pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dijelaskan sebagai rangkaian aktivitas penjaminan mutu yang dilakukan secara mandiri dan sistematis oleh perguruan tinggi untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara terencana serta mengalami peningkatan secara berkesinambungan (Unit Penjaminan Mutu Internal STT Ekumene, 2023)

Berdasarkan pemahaman tersebut, SPMI memiliki fungsi penting dalam mengawal penerapan KKNi agar tidak terbatas pada pemenuhan administrasi akademik. Melalui siklus penjaminan mutu, institusi dapat menetapkan standar, mengimplementasikan standar tersebut, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, mengambil tindakan pengendalian, dan melaksanakan peningkatan secara terus-menerus. Berbagai komponen penyelenggaraan pendidikan dapat ditempatkan dalam siklus tersebut, termasuk evaluasi terhadap pencapaian kompetensi lulusan. Oleh karena itu, CPL dapat menjadi salah satu indikator utama untuk melihat efektivitas mutu akademik suatu program pendidikan.

Dengan perspektif tersebut, respons STT terhadap KKNi perlu dibangun melalui keterpaduan antara arah kebijakan akademik, rancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, mekanisme asesmen, dan sistem penjaminan mutu. Proses peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui penilaian rutin terhadap ketercapaian CPL, pembaruan kurikulum berdasarkan kebutuhan, peningkatan kapasitas dosen, perluasan pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung, penyempurnaan perangkat asesmen, serta penggunaan informasi yang diperoleh dari mahasiswa dan alumni sebagai bahan evaluasi. Seluruh unsur tersebut perlu ditempatkan dalam satu mekanisme yang saling berhubungan.

Peningkatan mutu institusi juga tidak hanya bergantung pada pembenahan yang berlangsung di dalam kampus. STT perlu memiliki kemampuan membangun relasi dan komunikasi dengan pihak-pihak di luar institusi yang berkaitan dengan keberadaan dan pelayanan lulusan. Kajian mengenai strategi komunikasi pemasaran yang dapat digunakan oleh STT mengidentifikasi beberapa bentuk kegiatan, antara lain penyelenggaraan kompetisi, forum akademik, penyebaran informasi mengenai prestasi institusi, serta kegiatan promosi secara langsung (Studi et al., 2016). Walaupun kegiatan tersebut bukan merupakan perangkat utama dalam penerapan KKNi, komunikasi institusional dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Relasi tersebut selanjutnya dapat dikembangkan menjadi sumber informasi bagi STT dalam memahami harapan gereja,

kebutuhan masyarakat, dan tuntutan pelayanan terhadap kompetensi yang seharusnya dimiliki lulusan.

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, penerapan KKNi di lingkungan STT perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembenahan institusi secara menyeluruh, bukan hanya sebagai respons terhadap kewajiban regulatif. Implementasinya menuntut perubahan orientasi pendidikan dari penekanan pada penyelesaian studi menuju pencapaian kompetensi yang dapat dibuktikan. Perubahan tersebut perlu diikuti dengan penyelarasan kurikulum dan capaian pembelajaran, penerapan strategi belajar yang memberikan ruang lebih besar kepada mahasiswa, penyediaan pengalaman praktik yang relevan, penguatan mekanisme asesmen, dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam perspektif pendidikan tinggi teologi, KKNi memiliki peluang untuk menjadi instrumen yang membantu institusi mempertemukan tujuan akademik dengan tuntutan kompetensi nyata. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk memperkecil jarak antara orientasi pendidikan yang berhenti pada perolehan ijazah dan kebutuhan untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar mampu menjalankan tanggung jawabnya. Tantangan STT adalah mengadaptasi kerangka kualifikasi nasional tersebut ke dalam karakter pendidikan teologi. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditandai oleh kemampuan memahami teori dan pengetahuan teologis, tetapi juga oleh terbentuknya karakter, kecakapan pelayanan, kemampuan berinteraksi, serta kesiapan untuk mengambil bagian secara nyata dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Dalam kerangka ini, KKNi lebih tepat dipahami sebagai instrumen pengembangan kualitas pendidikan daripada sekadar kewajiban administratif.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada pimpinan institusi atau tenaga pengajar. Mahasiswa perlu ditempatkan sebagai sumber informasi yang penting karena mereka mengalami secara langsung berbagai tahapan proses pembelajaran. Pengalaman dan penilaian mahasiswa dapat memberikan gambaran mengenai tingkat relevansi kurikulum, kualitas pelaksanaan pembelajaran, serta kesesuaian kompetensi yang dibangun selama pendidikan dengan kebutuhan yang akan mereka hadapi setelah menyelesaikan studi.

Dalam penerapan KKNi pada Sekolah Tinggi Teologi, strategi peningkatan mutu dapat diwujudkan melalui mekanisme yang sistematis dan berulang. Langkah tersebut mencakup penilaian terhadap kesesuaian profil lulusan dan capaian pembelajaran, evaluasi serta pembaruan kurikulum, pengembangan profesionalisme dosen, perluasan pembelajaran berbasis pengalaman, penyempurnaan instrumen asesmen, dan pemanfaatan masukan yang diperoleh dari mahasiswa maupun alumni. Apabila seluruh komponen tersebut berjalan secara terpadu, KKNi tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga dapat menjadi kerangka yang menumbuhkan budaya mutu secara terus-menerus di lingkungan STT.

5. Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai Strategi Pengembangan STT

Dalam kerangka penerapan KKNi, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat dipandang sebagai peluang strategis bagi Sekolah Tinggi Teologi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis kompetensi. Sejumlah calon peserta didik mungkin telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman pelayanan, maupun pembelajaran melalui pendidikan nonformal dan pengalaman kerja, tetapi belum mendapatkan pengakuan akademik secara formal. Melalui RPL, berbagai pengalaman tersebut dapat dinilai berdasarkan capaian pembelajaran yang telah

ditetapkan sehingga memiliki kemungkinan untuk memperoleh pengakuan dalam sistem pendidikan formal (Widi Astuti, 2023).

Dalam konteks ini, STT perlu menempatkan RPL bukan sebagai sarana untuk mempersingkat proses memperoleh ijazah, melainkan sebagai mekanisme akademik untuk menilai dan mengakui kompetensi yang telah diperoleh sebelumnya. Pelaksananya harus didukung oleh prosedur asesmen yang objektif, transparan, dan sesuai dengan standar akademik. Apabila dikembangkan secara konsisten, RPL dapat menjadi salah satu strategi STT untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan teologi sekaligus mengakomodasi kebutuhan gereja dan masyarakat. “Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, ditargetkan kebijakan RPL sudah diimplementasikan di lingkungan Perguruan Tinggi, dalam hal ini, Keagamaan Islam (Koeron, 2024). Oleh karena itu, lingkungan STT sudah juga semestinya melakukan segera hal yang sama.

Dengan demikian, pengembangan RPL dapat menjadi langkah konstruktif dalam mewujudkan semangat KKNi yang menempatkan kompetensi sebagai dasar pengakuan kualifikasi. Ke depan, STT diharapkan mampu memanfaatkan mekanisme ini secara bertanggung jawab sehingga pengalaman belajar dan pelayanan yang telah dimiliki seseorang dapat memperoleh pengakuan melalui proses akademik yang terukur, tanpa mengurangi kualitas dan integritas pendidikan teologi

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan KKNi di Sekolah Tinggi Teologi perlu diarahkan pada pencapaian kompetensi, bukan sekadar pemenuhan dokumen akademik. KKNi perlu diintegrasikan secara menyeluruh melalui profil lulusan, capaian pembelajaran, kurikulum, pembelajaran, asesmen, praktik pelayanan, dan sistem penjaminan mutu. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan teologi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, keterampilan pelayanan, dan kemampuan menerapkan kompetensinya dalam kehidupan gereja dan masyarakat.

RPL menjadi peluang penting untuk dikembangkan oleh STT karena memungkinkan pengalaman belajar, pelayanan, pelatihan, dan kompetensi sebelumnya dinilai serta diakui melalui mekanisme akademik yang terukur. RPL perlu dipahami sebagai bentuk pengakuan kompetensi, bukan sebagai jalan pintas memperoleh ijazah.

Oleh karena itu, STT perlu merespons KKNi dan RPL secara lebih terbuka, sistematis, dan berkelanjutan. Implementasi keduanya diharapkan mampu memperkuat budaya mutu, memperluas akses pendidikan teologi, dan memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kebutuhan gereja dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, R., Basir, Z., & Data, M. U. (2025). Efek Pengalaman Magang , Soft Skill Dan Motivasi Bekerja Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Dalam Memasuki Dunia Kerja. 4(2), 2701–2709.
- Aziz, N., Muslim, K., & Ilmi, I. (2024). STRATEGI PENINGKATAN MUTU LULUSAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DAN ISU GLOBAL (STUDI KASUS STISIP TASIKMALAYA). 02(02).
- Carey, W., Carey, W., Theological, M., Tim, P., Carey, W., Carey, W., & Theological, M. (2024)
- Cici Nur Indah Sari, S. A. M. M. (n.d.). PENGARUH SOFT SKILL DAN HARD SKILL

TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA DI BANK SYARIAH.

- Indonesia, R. (2012). Presiden republik indonesia.
- Koeron, M. (2024). Kemenag Target PTKI Tahun Ini Gelar Program Rekognisi Pembelajaran Lampau, Apa Itu? KONTRIBUTOR.
- Mardiharto. (2019). Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Bidang Pendidikan Agama Kristen, 15, 28–32.
- Munawaroh, U., Psikologi, P. S., Trunojoyo, U., & Madura, U. T. (n.d.). KESIAPAN KERJA PADA SARJANA FRESH GRADUATE DI.
- Oscar, Y., Widyaningrum, N., & Widianti, N. (2026). Meningkatkan Daya Saing Global : Peran Kompetensi Lulusan dan Pengalaman Kerja Petugas Pelayaran Niaga Indonesia. 7(4), 659–669.
- Parerungan, R. H. (2018). Kompetensi Kerja dan Penyesuaian Diri Pada Fresh Graduate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang Tidak Bekerja Sebagai Guru. 6(4), 552–559.
- Pramesti, K. D., Meisya, N. I., Amrillah, R., & Ekonomi, S. P. (2024). Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja. 03(04), 236–243.
- Sari, V. D. (n.d.). ANALISIS KESIAPAN KERJA SISWA DITINJAU DARI PERILAKU.
- Studi, P., Agama, P., Tinggi, S., Simpson, T., Pascasarjana, P., & Manajemen, M. (2016). STRATEGI BERSAING UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA DI UNGARAN I Putu Ayub Darmawan.
- Unit Penjaminan Mutu Internal STT Ekumene. (2023). Mutu Penelitian.
- Widi Astuti. (2023). Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.